

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengelola ekonominya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, yang berasal dari berbagai macam sumber seperti retribusi daerah, pajak, dan pendapatan asli lainnya (Riharjo, 2021). Salah satu pilar utama PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat menjadikan PKB sebagai sumber pendapatan yang strategis (Rahmalia, 2017).

Pemerintah Kabupaten Madiun mengandalkan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber potensial untuk meningkatkan PAD. Daya beli kendaraan bermotor dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan yang berkorelasi dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor (Maharani, 2023). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang pajak kendaraan bermotor yang menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang diperlukan oleh orang pribadi atau badan usaha, bersifat memaksa, dan digunakan untuk kebutuhan daerah guna meningkatkan perekonomian (Akbar, 2021).

Efektivitas berasal dari istilah efektif, yang menunjukkan kapasitas untuk menghasilkan hasil tertentu atau memberikan pengaruh tertentu yang dapat diukur. Mengingat salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, maka hal ini menjadikannya sebagai komponen yang paling besar karena kontribusinya yang cukup besar terhadap PAD. Oleh karena itu Efektivitas pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi krusial dalam konteks penerimaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah saat ini dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran warganya dengan cara melaksanakan tugas pembangunan daerah. Hal ini mempengaruhi kontribusi pajak daerah terhadap PAD, yang merupakan sumber yang sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi elemen penting dalam membiayai pembangunan dan program-program kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang signifikan dalam mendanai pembangunan di tingkat Kabupaten adalah melalui pungutan pajak daerah (Lina Nurlaela, 2018). Oleh karena itu Evaluasi efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi krusial untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah.

Tabel 1. 1 Realisasi PKB berdasarkan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	22,532,116,890.00	258,211,505,535.00	8.73%	Sangat Kurang
2021	50,456,347,963.00	333,154,568,459.00	15.15%	Kurang
2022	42,391,512,580.00	377,425,844,392.00	11.23%	Kurang
2023	49,108,679,921.00	298,041,423,404.00	16,48%	Kurang

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2023. Kontribusi PKB mengalami penurunan menjadi "Sangat Kurang" pada tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 8.73%. Meskipun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi "Kurang" dengan kontribusi sebesar 15.15%, namun pada tahun 2022 kontribusi kembali menurun menjadi "Kurang" dengan persentase 11.23%. Hal ini menunjukkan kemungkinan permasalahan pada efisiensi, nilai, dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Tabel 1. 2 Realisasi Komponen PAD

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (%)	Realisasi Retribusi Daerah (%)	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (%)	Realisasi lain-lain PAD yang Sah (%)
2020	27%	3%	3%	67%
2021	24%	2%	2%	72%
2022	25%	2%	2%	71%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun

Tabel 1.2, menunjukkan bahwa kontribusi PKB pada Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD belum mencapai 50%. Menurut data dikatakan bahwa ketergantungan pada sumber pendapatan lainnya menjadi lebih besar jika berdasarkan data yaitu pada Realisasi Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Madiun. Terlebih lagi, rendahnya kontribusi PKB juga dapat menandakan rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Dikutip dari (Global Business, 2024) Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada tahun 2023 di Kabupaten Madiun hanya di angka 56.09%. Hal tersebut menjadi perhatian bagi Tim Samsat Madiun Kabupaten mengingat pembayaran pajak ini berkontribusi besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Madiun. Banyak inisiatif strategis dari Tim Samsat Madiun Kabupaten untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB dan salah satunya dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi baik dalam bentuk pemberitaan di media cetak, online dan radio serta terjun langsung ke masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat sembari memberikan edukasi pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.

Rendahnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak hanya berdampak pada keseimbangan fiskal daerah, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan yang kurang dari wajib pajak kendaraan bermotor di

wilayah Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditangani secara lebih efektif. Salah satunya adalah meningkatkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD dengan mengoptimalkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dalam situasi ini, diperlukan penelitian tambahan untuk mengetahui alasan penurunan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menentukan tindakan terbaik untuk meningkatkan PAD pada efikasi, kontribusi, dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Madiun.

Peneliti memilih Kabupaten Madiun sebagai objek penelitian karena merupakan wilayah yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor yang signifikan dan relevan untuk dianalisis. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemikiran dan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan serta pihak terkait dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah. Menurut Beberapa Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Y. Casmadi, (2023) menunjukkan bahwa pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bogor selama periode 2017-2021 efektif dengan tingkat efektivitas mencapai 98,16%. PKB juga memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dengan persentase kontribusi rata-rata sebesar 42,96%.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Reinhard Valen Ipu et al. (2022) di Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan bahwa PKB berkontribusi terhadap PAD sebesar 10,58% secara rata-rata selama periode 2017-2019. Penelitian oleh Putri Miranti Harahap et al. (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Deli Serdang menemukan bahwa kontribusi PKB terhadap target kontribusi PAD mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017-2020, dengan persentase rata-rata 110,35%.

Penelitian yang dilakukan oleh Maju Siregar, (2020) menunjukkan bahwa kontribusi PKB roda dua dan roda empat terhadap PAD di UPT SAMSAT Medan Selatan Tahun 2014 – 2017 menunjukkan kategori sangat baik dengan persentase di atas 50%, meskipun efektivitasnya mengalami

fluktuasi. Sarana dan prasarana, koordinasi rutin, keterlibatan masyarakat, dan kondisi anggaran menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bervariasi tergantung pada lokasi dan tahun penelitian. Faktor-faktor seperti sosialisasi, kualitas layanan, dan kondisi ekonomi masyarakat memainkan peran penting dalam mengetahui efektivitas, kepatuhan, dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD. Oleh karena itu, peneliti memilih judul "Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana optimalisasi kebijakan terhadap Kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Madiun
3. Bagaimana strategi dan upaya yang harus dilakukan dalam proses penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk menjaga optimalisasi efektivitas, kontribusi, dan kepatuhan di Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat diketahui:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun.
2. Mengetahui kebijakan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Madiun.
3. Mengetahui strategi dan upaya yang perlu dilakukan dalam proses penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk menjaga optimalisasi

efektivitas, kontribusi, dan kepatuhan di Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2023 di Kabupaten Madiun. Informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi pengumpulan pajak kendaraan bermotor agar lebih efisien dan efektif.
- b. Hasil analisis kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan wawasan tentang seberapa besar peran pajak kendaraan bermotor dalam mendukung pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat. Ini akan membantu pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya untuk program-program pembangunan yang lebih berkelanjutan.

2. Kontribusi Teoretis

- a. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori mengenai efektivitas serta peran pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat menjadi referensi bagi peneliti atau akademisi lain yang tertarik dalam bidang ekonomi daerah atau kebijakan publik terkait pajak dan pendapatan daerah.

3. Kontribusi Kebijakan

- a. Para pembuat kebijakan dapat menggunakan temuan studi ini sebagai landasan untuk mengembangkan inisiatif yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan porsi pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan bagi masyarakatnya. Pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam membantu kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Kabupaten Madiun dengan memanfaatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan memahami tantangan yang ada dan mencari solusinya.

Untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak dan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak sekaligus menurunkan kemungkinan hilangnya pendapatan daerah, para pengambil kebijakan juga dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk menginformasikan upaya mereka dalam mereformasi pajak daerah.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Madiun pada tahun 2023. Namun, terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini tidak akan memasukkan pajak daerah lainnya ke dalam analisis, melainkan hanya akan fokus pada PKB. Kedua, penelitian ini akan terbatas pada data tahun 2023 agar dapat mencerminkan keadaan terkini. Selain itu, hasil penelitian ini juga hanya dapat diterapkan langsung pada wilayah Kabupaten Madiun dan tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Selanjutnya, penelitian ini akan memfokuskan pada hambatan dan upaya terkait pengumpulan PKB, tanpa mencakup aspek kebijakan lain yang mungkin memengaruhi pengumpulan pajak.